

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT YANG
BERHAK ATAS OBJEK PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN BANDARA
NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
(Studi di Dusun Kepek dan Dusun Bapangan Desa Glagah
Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Disusun oleh:

QUSNUL SYAMSUDIN DWI SAPUTRO

NIT. 14232823/MP

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritik	6
1. Konsep Kondisi Sosial Masyarakat.....	6
2. Konsep Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	7
3. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	8
B. Kerangka Pemikiran.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Format Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian.....	16
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan.....	16
D. Definisi Operasional Konsep	17
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	17
F. Analisis Data.....	19
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Fisik Wilayah.....	23
1. Kondisi Geografis Kecamatan Temon	23
2. Kondisi Topografi Wilayah	26
B. Gambaran Umum Masyarakat Temon	28
1. Kondisi Demografi	28
2. Kondisi Mata Pencaharian	29

BAB V KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT	30
1. Kondisi Sosial Masyarakat Dusun Kepek dan Bapangan	30
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Dusun Kepek dan Bapangan.....	36
BAB VI PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43

ABSTRACT

The problem in land acquisition in general is the implementation of the compensation stage after the release of land where overall the compensation is in the form of money. People who are entitled to the object of airport land acquisition experience loss of house and land and get compensation, but do not make the community get a good change in improving their lives than before. The process of land acquisition for the construction of New Yogyakarta International Airport in Temon Subdistrict, Kulon Progo Regency, also experienced changes in socio-economic conditions for the people affected by the object of airport land acquisition. The purpose of this study is to provide an overview of information on the socio-economic conditions of the people who are entitled to the object of land acquisition for the construction of NYIA Airport. The instrument for collecting data is using questionnaires and interviews as qualitative data and using document and field studies. Glagah Village, which is one of the villages that is the object of land acquisition, especially Kepek and Bapangan Hamlets, whose territory has been affected by the construction of NYIA Airport is marked by the people who have jobs as farmers, traders, casual daily laborers, and others. Where, after the release of land rights became the object of airport land acquisition, some people suffered loss of houses and land. The airport provides compensation to the community for their land use, then the community uses it to buy land and build houses on the relocation sites provided by the village government. The relocation causes changes in the socio-economic conditions of the community so they must adapt in a new place. Adaptation in social life includes participation in social organizations, and maintaining good relations with environmental relatives. Adaptation in economic life includes several efforts such as seeking new livelihoods and additional jobs and saving money for savings. It is expected that the socio-economic conditions of the people who are entitled to the NYIA Airport land acquisition object can improve the welfare of the community.

Keywords: conditions, social, economic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini sedang membangun di segala bidang baik pembangunan fisik maupun non fisik. Kegiatan pembangunan memerlukan tanah sebagai sarana dalam menyelenggarakan seluruh segi kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan karena tanah tidak saja mengandung nilai ekonomis dan kesejahteraan semata sebagai anggapan sementara orang, akan tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya dan psikologis. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia dengan cara pelepasan hak atas tanah sering menimbulkan permasalahan. Kebutuhan akan tanah semakin meningkat guna mendukung pelaksanaan pembangunan, sementara di pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas.

Permasalahan lain yang timbul adalah pelaksanaan tahap ganti rugi setelah pelepasan tanah dimana secara keseluruhan memilih ganti rugi berupa uang. Sebagai contoh dalam pengadaan tanah pembangunan Bandara Kuala Namu di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dimana masyarakat yang berhak yang atas objek pengadaan tanah bandara mengalami kehilangan rumah dan lahan dan mendapat ganti rugi, akan tetapi tidak menjadikan masyarakat mendapat perubahan yang baik dalam meningkatkan kehidupan mereka dari yang sebelumnya. Masyarakat harus melakukan adaptasi dalam mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Demikian juga yang terjadi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo juga mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat yang terkena objek pengadaan tanah bandara.

Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) dilatarbelakangi oleh kondisi Bandar Udara Adisucipto yang semakin padat

dan kelebihan kapasitas (*over capacity*) untuk menampung pertumbuhan penumpang, pesawat, bagasi dan kargo. Upaya peningkatan kualitas telah beberapa kali dilakukan dengan memperluas lahan bandara pada tahun 2004 seluas 77.200 m² guna pembangunan parkir. Dilanjutkan pada tahun 2005 seluas 25.189 m² dan pada tahun 2006 seluas 11.600 m² di sebelah utara rel yang juga untuk perluasan bandara umum namun belum bisa menampung jumlah wisatawan yang terus bertambah tiap tahunnya (Listyawati 2006, 8). Walaupun telah dilakukan perluasan bandara namun masih belum bisa menampung jumlah wisatawan yang terus bertambah tiap tahunnya. Dengan daya tampung hanya 1,2 juta penumpang Bandara Adisutjipto mulai mengalami penurunan kualitas layanan karena jumlah penumpang yang dilayani tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas yang ada (Dhika 2017). Di sisi lain, pengembangan Bandara Adisutjipto sangat terbatas karena berbagai keterbatasan lahan serta permasalahan keselamatan udara terkait keberadaan penghalang alam di area sebelah timur bandara. Melihat kondisi tersebut, Bandara Adisutjipto yang sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan memunculkan wacana PT. Angkasa Pura I (persero) untuk membangun bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Proses pembangunan bandara NYIA termasuk dalam kategori penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (UU 2/2012) tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 10 poin d. Penyelenggaraan Pengadaan tanah untuk pembangunan ditandai dengan diterbitkannya Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara di Kulon Progo oleh Gubernur DIY. Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara di Kulon Progo ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No.68/KEP/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disebutkan dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL), bandara baru Yogyakarta akan menempati lahan di Temon seluas 645,63 hektar. Lokasi itu meliputi lima desa di Kecamatan Temon, yaitu Desa Glagah, Palihan, Jangkar, Sindutan dan Kebon Rejo.

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandara NYIA tidak terlepas dari adanya permasalahan dalam proses pengadaan tanahnya. Penolakan terhadap terbitnya penetapan lokasi bandara mencapai puncaknya ketika Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) mengajukan gugatan terhadap surat keputusan penetapan lokasi yang dikeluarkan Gubernur DIY. Akibatnya proses pengadaan tanah sempat terhenti pada tahap pengumuman penetapan lokasi sejak Juni 2015 menyusul putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DIY yang mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan tersebut. Pembangunan bandara baru yang sempat terhenti akhirnya dapat dilanjutkan setelah dikabulkannya permohonan kasasi Gubernur DIY dengan nomor register 456 K/TUN/2015 oleh Mahkamah Agung.

Penolakan yang dilakukan berimplikasi terhadap nilai ganti kerugian yang ditaksir terhadap ± 300 bidang tanah milik WTT. Tim penilai hanya dapat menilai berdasarkan luas masing-masing bidang tanpa menilai benda-benda yang ada di atasnya (baik itu bangunan maupun tanam tumbuh). Hal ini karena tindakan warga WTT yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Sampai akhirnya ganti kerugian dibayarkan, warga WTT tetap menolak ganti kerugian yang diberikan sehingga pemerintah terpaksa menitipkan uang ganti kerugian ke pengadilan negeri setempat yakni Pengadilan Negeri Wates. Namun apa yang terjadi jika masyarakat juga tidak mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan, apakah pengadaan tanah dikatakan telah menjamin hak-hak masyarakat pemilik tanah. Terlebih lagi nilai ganti kerugian milik warga WTT yang dititipkan belum mencakup keseluruhan ganti kerugian yang seharusnya diterima.

Berdasarkan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Realisasinya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Pasal 18 dalam Perda No. 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa

bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur. Jika dilihat dari kondisi geografis Kecamatan Temon menjadi wilayah stategis bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menentukan lokasi pembangunan bandara dibandingkan dengan Kecamatan Panjatan, Wates, dan Galur. Dalam rangka merealisasi pembangunan NYIA diperlukan adanya pengadaan tanah untuk menyediakan tanah sebagai lokasi pembangunan. Kegiatan penyediaan tanah dalam rangka pengadaan tanah salah satunya dilakukan dengan pembebasan tanah atau dengan kata lain pelepasan hak atas tanah.

Pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah memiliki keterkaitan erat dalam bidang keadilan sosial, maka dalam hal ini, pada dasarnya keadilan sosial adalah suatu masalah universal yang ada manakala rakyat merasa tertindas. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 UU 2/2012, yang dimaksud pelepasan hak adalah pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan. Di dalam pelepasan hak untuk kepentingan umum, Negara harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pemiliknya, sehingga paling tidak kehidupan pemilik sebelumnya lebih baik daripada kehidupan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul **“Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Berhak Atas Objek Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (Studi di Dusun Kepek dan Dusun Bapangan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berhak atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengetahui sosial ekonomi masyarakat yang berhak atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA);

1. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berhak atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA)
2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, khususnya tentang penyelenggaraan pengadaan tanah beserta dampaknya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pengamatan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berhak atas objek pengadaan tanah Bandara *New Yogyakarta International Airport* di Dusun Kepek dan Dusun Bapangan Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kondisi sosial masyarakat Dusun Kepek dan Dusun Bapangan sudah tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat Dusun Kepek dan Dusun Bapangan yang mayoritas adalah petani, disamping itu ada beberapa yang bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Pengusaha dan Pensiunan. Selain itu, dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan sebagian besar SLTA dan mereka juga meneruskan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan penduduk, karena pada pembangunan sekarang ini sangat diperlukan partisipasi dari penduduk yang terdidik dan terampil agar dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan.
- b. Kondisi ekonomi masyarakat Dusun Kepek dan Dusun Bapangan belum terlalu nampak, dari segi pendapatan yang diperoleh setelah relokasi sebagian besar masyarakat belum mengalami perubahan hanya ada beberapa informan yang mengalami perubahan pendapatan. Kondisi ini dikarenakan pembangunan Bandara NYIA belum selesai sehingga dampak terhadap taraf hidup masyarakat belum terlalu dirasakan oleh warga yang berhak atas objek pengadaan tanah Bandara NYIA.

B. Saran

Saran-saran yang dapat peneliti berikan ataupun ajukan bagi pihak yang berkaitan (pihak Bandara/Pemerintah), adalah :

- a. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa peningkatan kualitas SDM agar masyarakat mampu mengelola uang ganti kerugian untuk keberlanjutan usaha. Sedangkan, bagi pihak Bandara Namu sebaiknya mampu membuat program-program yang dapat membuat setiap orang yang bekerja di bandara tersebut menjadi lebih semangat untuk tetap bekerja di bandara. Misalnya, dengan memberikan bantuan beasiswa kepada setiap anak dari buruh/karyawan yang bekerja di bandara tersebut yang memiliki prestasi.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menganalisa dinamika sosial ekonomi masyarakat pasca pengadaan tanah untuk Bandara NYIA apabila telah seutuhnya selesai dalam kurun waktu tertentu. Sehingga didapatkan data yang lebih akurat dan lebih menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- c. Merekrut masyarakat lokal atau sumber daya manusia setempat di desa yang tanahnya terkena obyek pengadaan tanah sebagai tenaga kerja dalam pembangunan Bandara NYIA.
- d. Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan pemberdayaan masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka.
- e. Pemerintah dapat berperan sebagai pendamping dan fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti menyelenggarakan berbagai pelatihan usaha untuk menunjang perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi. 2003. *Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan*. Jakarta: CV Buana.
- Ahmed, Hasan. 2001. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arifin, Zaenal. 2002. *Kondisi Sosial Ekonomi Petani Tebu di Desa Negara Batin Sungkai Selatan*. Bandar Lampung: UNILA.
- Badan Pusat Statistik.2017. *Statistik Daerah Kecamatan Temon 2017*. Kulon Progo: BPS.
- Badan Pusat Statistik.2017. *Kecamatan Temon Dalam Angka 2017*. Kulon Progo: BPS.
- Dalyono. 2005. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta Gerungan.
- Dhika. 2017. *Mendesak Bandara Alternatif Yogyakarta*. Yogyakarta: Angkasa Pura.
- Fatahillah, R. 2016. *Rencana Pembangunan Bandara Untuk Kepentingan Siapa. Seruan Aksi dan Advokasi. In Edisi Bandara (pp. 1-5)*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Fauzi, N. 1999. *Petani dan Penguasa: Perubahan Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIT dan KPA.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Tatanusa.
- Ihsan, Fuad. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B., 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Kamus Umum Bahasa Indonesia Tahun 2000
- Kartono, K., & Gulo, D. 2000. *Kamus Psikolog*. Bandung: CV. Pionir Jaya.
- Linton, Ralph. 2000. *Antropologi: Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*. Bandung: Jemars.

- Listyawati, Hery. 2006. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Adi Sutjipto Menjadi Bandara Internasional*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Muhtar,A.2015. *Kajian Dampak Pembebasan Lahan Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho,(2006). *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- M. Sastropradja. 2000.*Status Sosial Masyarakat*. Jakarta: Karya Pustaka.
- Malo, Manaso. 2001. *Kedudukan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Mulyanto. 2001. *Aspek Sosial Ekonomi dalam kaitan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sajogyo. 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Salim. 2002. *Kosep Sosiologis Manusia Sebagai Makhluk Sosial*. Jakarta: CV Karyajaya.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sodiki, Achmad 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta : Konstitusi Press
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumardi. 2001. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*.. Yogyakarta/; Suara Media.
- Sumardjono, Maria S.W. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Tauchid, M. 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wiradi, G. 2000. *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Pers.
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Pirnomop. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Pustaka Utama.
- Zulkarnaen, W. 2013. *Perubahan Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara

PERATURAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

WEBSITE

Dhika 2017. *Mendesak Bandara Alternatif Yogyakarta* dilihat tanggal 6 Juli 2018
Pukul 14.45 WIB pada <http://adisutjipto.ap1.co.id/id/news/2/index?detail=mendesak-bandara-alternatif-yogyakarta>

WAWANCARA

Bapak Fatkurrohman, selaku Kepala Dusun Kepek pada tanggal 20 April 2018

Bapak Suparjo, selaku Kepala Dusun Bapangan pada tanggal 20 April 2018

Informan Masyarakat Dusun Kepek dan Bapangan :

Bapak Wiyatmo

Bapak Catur Rochmad Syaleh

Bapak Suwandi

Bapak Kuswiyanto

Ibu Susmiasih

Bapak Sokomulyono

Bapak Suyono

Bapak Sudarman

Bapak Parsono

Bapak Sukaryo

Bapak Nanang Wiyatmo

Bapak M. Syukron

Ibu Sadiyah

Bapak R. Tri Laksono

Bapak Suyadi

Bapak Aji Puji Raharjo